

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Terhadap Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

Ilham Ferdiansyah¹, Itat Tatmimah², Muzayyanah³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia
Email: muzayyanah@umc.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pelaporan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa, dengan studi kasus di Desa Kemlakagede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik akuntabilitas maupun transparansi pelaporan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi mendorong penggunaan sistem digital yang lebih terstruktur, sedangkan transparansi pelaporan yang baik memperkuat kebutuhan akan digitalisasi guna meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola keuangan desa melalui integrasi teknologi digital guna menciptakan pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi Pelaporan, Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

This study aims to analyze the influence of accountability and reporting transparency on the digitalization of village financial management, with a case study in Kemlakagede Village, Tengah Tani Sub-district, Cirebon Regency. A quantitative approach was employed using a survey method through questionnaires distributed to village officials involved in financial management. The analysis results indicate that both accountability and reporting transparency have a significant influence, both partially and simultaneously, on the digitalization of financial management. High levels of accountability encourage the adoption of more structured digital systems, while strong reporting transparency reinforces the need for digitalization to enhance information accessibility and openness. These findings highlight the importance of strengthening village financial governance through the integration of digital technology to achieve efficient, transparent, and accountable financial management.

Keywords: Accountability, Reporting Transparency, Digitalization Financial Management

Pendahuluan

Desa merupakan unit wilayah administratif terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola

urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa desa merupakan entitas hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan karakteristik lokal.

Keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu aspek krusial dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan adalah tata kelola keuangan desa yang baik serta berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Amtiran & Molidya, 2020). Dalam era digital saat ini, transformasi digital menjadi sebuah keharusan, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan desa. Digitalisasi pengelolaan keuangan merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan penggunaan anggaran desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta mengurangi potensi kesalahan dan penyalahgunaan anggaran.

Desa Kemlakagede, salah satu desa di Indonesia, telah mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan keuangannya sejak tahun 2020. Penerapan sistem ini memberikan dampak positif seperti pencatatan transaksi secara real-time, peningkatan efisiensi pelaporan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Namun demikian, proses digitalisasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan data, keterbatasan infrastruktur, dan keterampilan teknis dari pengelola sistem (Sipakoly et al., 2023).

Masalah keamanan digital menjadi isu penting di Desa Kemlakagede. Infrastruktur digital yang belum sepenuhnya memadai membuat sistem rentan terhadap serangan siber dan kebocoran data. Selain itu, terdapat permasalahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 yang menunjukkan defisit anggaran sebesar Rp358.175.000. Defisit ini hanya dapat

ditutupi dengan sumber pendapatan desa. Ketergantungan pada SILPA mengindikasikan lemahnya perencanaan anggaran jangka panjang. Permasalahan lainnya mencakup ketidaksesuaian kebijakan terkait perpajakan antara pendekatan prata yang menetapkan pajak sebesar 11% dan pendekatan intraporet yang tidak mengenakan pajak. Ketidakharmonisan kebijakan ini menimbulkan kebingungan dalam pelaporan keuangan serta perbedaan persepsi di kalangan perangkat desa.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif. Sedangkan transparansi, sebagaimana dijelaskan oleh Hari Sabarno (2007) adalah keterbukaan informasi menjadi prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Penelitian yang dilakukan oleh Klaudia (2024) membuktikan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa dapat mempercepat proses transaksi, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan meningkatkan transparansi pelaporan. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh Gwijangge et al. (2021) yang menegaskan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa sistem digitalisasi keuangan desa tidak hanya berjalan efektif, namun juga akuntabel dan transparan. Di tengah meningkatnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat, kemampuan desa untuk mengelola keuangan secara digital dengan sistem yang aman, transparan, dan akuntabel menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Apalagi di Desa Kemlakagede, digitalisasi telah diterapkan, namun masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti defisit anggaran, kerentanan keamanan data, serta belum optimalnya pemahaman perangkat desa dalam pelaporan digital. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang menggabungkan dua aspek utama akuntabilitas dan transparansi pelaporan sebagai determinan terhadap tingkat efektivitas digitalisasi pengelolaan keuangan desa, yang belum banyak dikaji secara simultan dalam konteks desa yang telah mengimplementasikan sistem digital seperti Kemlakagede. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menekankan aspek teknis atau evaluasi implementasi digitalisasi secara umum, tanpa

mengaitkannya secara langsung dengan dimensi akuntabilitas dan transparansi pelaporan dalam konteks praktik nyata keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris yang lebih mendalam terhadap literatur tata kelola keuangan desa berbasis digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengungkapkan hubungan antarvariabel melalui data numerik dan teknik analisis statistik. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:39), penelitian kuantitatif menghasilkan temuan yang dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau metode pengukuran tertentu, sehingga memungkinkan untuk mengukur tingkat pengaruh masing-masing variabel secara objektif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam pengawasan serta pengelolaan keuangan desa Kemlakagede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sensus, yakni seluruh populasi dijadikan sampel. Pendekatan ini diambil karena jumlah populasi yang kurang dari 100 orang, sehingga menurut pendapat Arikunto (2019), apabila populasi kurang dari 100 maka seluruhnya dapat dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden yang terdiri dari perangkat desa, pengelola keuangan desa, dan perwakilan masyarakat..

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner atau angket yang disebarkan secara langsung kepada responden. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup, dengan menggunakan skala Likert 4 poin untuk mengukur persepsi responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Skala Likert dalam penelitian ini terdiri atas: (1) Sangat Tidak Setuju (1), (2) Tidak Setuju (2), (3) Setuju (3), dan (4) Sangat Setuju (4). Pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel, yaitu akuntabilitas,

transparansi, dan digitalisasi pengelolaan keuangan, sehingga dapat diperoleh data yang relevan dan terukur sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan uji hipotesis (uji t, uji F, dan koefisien determinasi). Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi operasional variabel

Variabel	Indikator	Skala
Akuntabilitas (X1)	1. Jumlah laporan audit 2. Kepuasan masyarakat 3. Ketersediaan laporan 4. Frekuensi pelaporan	Likert 1–4
Transparansi (X2)	1. Perumusan masalah 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Penataan usaha 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban 6. Pembinaan dan pengawasan	Likert 1–4
Digitalisasi Pengelolaan Keuangan (Y)	1. Tingkat adopsi teknologi 2. Ketersediaan platform digital 3. Akses dan pembaruan data 4. Keamanan data	Likert 1–4

Hasil Dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 50 responden, sebanyak 34 responden (68%) merupakan laki-laki, dan 16 responden (32%) merupakan perempuan. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki.

Tabel IV-1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	34	68%
Perempuan	16	32%
Total	50	100%

Sumber: Data diolah 2025

4.1.2 Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Sebanyak 14 responden (28%) berada pada rentang usia 20–30 tahun, sedangkan 36 responden (72%) berusia di atas 30 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah individu berusia lebih dari 30 tahun.

Tabel IV-2 Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20–30	14	28%
>30	36	72%
Total	50	100%

Sumber: Data diolah 2025

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa:

Tabel IV-3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
X1	50	14.00	25.00	19.360	2.56952
X2	50	12.00	25.00	19.540	2.90116
X3	50	15.00	25.00	20.280	2.72584
Y	50	10.00	25.00	19.740	3.09582

Sumber: Data diolah 2025

4.2.2 Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel memiliki nilai **r hitung > r tabel (0,088)**. Dengan demikian, semua item kuesioner dinyatakan **valid**.

4.2.3 Uji Reliabilitas

Nilai Cronbach's Alpha untuk seluruh variabel berada di atas nilai batas minimal reliabilitas yaitu 0,60, sehingga seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel.

Tabel IV-5 Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	R Tabel	Keterangan
Akuntabilitas	0.640	0.60	Reliabel
Transparansi Pelaporan	0.657	0.60	Reliabel
Digitalisasi Keuangan	0.722	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah 2025

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar **0.200 > 0.05**, sehingga data **berdistribusi normal**.

2. Uji Multikolinearitas

Nilai tolerance > 0.01 dan VIF < 10 untuk semua variabel, yaitu tolerance = 0.754 dan VIF = 1.327. Maka, **tidak terdapat multikolinearitas**.

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot yang tersebar secara acak, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala **heteroskedastisitas**.

4.2.5 Uji Hipotesis

Tabel IV-6 Uji t

Variabel	t Hitung	Sig	Keterangan
Akuntabilitas	2.924	0.005	H1 diterima
Transparansi	6.245	0.000	H2 diterima

Sumber: Data diolah 2025

Hasil menunjukkan bahwa baik akuntabilitas maupun transparansi berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi keuangan ($\text{sig} < 0.05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$).

Tabel IV-7 Uji F

Model	F	Sig	Kesimpulan
Regression	31.561	0.000	H3 diterima

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan uji F, kedua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan.

Tabel IV-11 Koefisien Determinasi

Nilai R	R Square	Adjusted R Square
0.927	0.859	0.850

Sumber: Data diolah 2025

Nilai R Square sebesar 0.859 menunjukkan bahwa 85.9% variasi digitalisasi pengelolaan keuangan dapat dijelaskan oleh akuntabilitas dan transparansi pelaporan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana akuntabilitas dan transparansi pelaporan mempengaruhi digitalisasi pengelolaan keuangan di Desa Kemlakagede. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut, baik secara parsial maupun simultan, memiliki pengaruh positif terhadap penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa. Penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Digitalisasi Pengelolaan Keuangan di Desa Kemlakagede

Akuntabilitas terbukti berkontribusi positif terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi komitmen pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan secara

terbuka, semakin besar pula dorongan untuk menggunakan sistem digital yang mampu mencatat, melacak, dan melaporkan transaksi keuangan secara efisien dan transparan.

Temuan ini mendukung pandangan Bahtiar dan Ardiansyah (2019) yang menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola keuangan desa yang baik. Penerapan akuntabilitas mendorong pengelola keuangan untuk mengadopsi teknologi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang lebih modern dan mudah diakses. Selain itu, menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik juga menuntut adanya sistem yang bisa mempermudah proses pelaporan kepada masyarakat, di mana digitalisasi menjadi solusi yang relevan dalam menjawab kebutuhan tersebut.

Sebaliknya, apabila prinsip akuntabilitas tidak dijalankan dengan optimal, maka digitalisasi sulit berkembang karena tidak adanya dorongan internal maupun eksternal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

2. Pengaruh Transparansi Pelaporan terhadap Digitalisasi Pengelolaan Keuangan di Desa Kemlakagede

Transparansi pelaporan memiliki hubungan yang erat dengan penguatan digitalisasi keuangan desa. Ketika pemerintah desa secara terbuka memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan, maka tuntutan terhadap sistem yang cepat, akurat, dan mudah diakses menjadi semakin tinggi. Hal ini menjadi faktor pendorong dalam penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan studi Alfiani dan Estiningrum (2021), yang menunjukkan bahwa transparansi mendorong pemerintah desa untuk lebih profesional dan terbuka dalam pelaporan keuangan, di mana penggunaan sistem digital menjadi media efektif untuk menyampaikan informasi keuangan secara real-time dan sistematis. Transparency International (2020) juga menyebutkan bahwa digitalisasi merupakan alat yang penting untuk meningkatkan keterbukaan dan meminimalkan praktik penyalahgunaan dana publik. Namun, masih terdapat penelitian seperti yang dilakukan oleh Yanti et al. (2023), yang menunjukkan bahwa

transparansi belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip good governance.

3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan terhadap Digitalisasi Pengelolaan Keuangan di Desa Kemlakagede

Secara simultan, akuntabilitas dan transparansi pelaporan terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Kedua variabel ini merupakan landasan tata kelola yang mendorong pemerintah desa untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih modern, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika akuntabilitas dan transparansi dijalankan secara bersamaan, maka digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan demi mendukung pelaporan keuangan yang terbuka, akurat, dan tepat waktu. Penelitian Bahtiar dan Ardiansyah (2019) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa kombinasi antara akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik. Hal ini karena keberadaan sistem digital memberikan jaminan akan kejelasan informasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, kajian dari World Bank (2021) menyatakan bahwa digitalisasi dalam tata kelola keuangan publik sangat bergantung pada keberadaan sistem nilai seperti akuntabilitas dan transparansi, karena teknologi hanya akan efektif jika didukung oleh komitmen terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kemlakagede, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pelaporan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Tingginya akuntabilitas aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan setiap proses pengelolaan keuangan mampu mendorong penggunaan sistem digital yang lebih efisien, transparan, dan akurat. Demikian pula, keterbukaan informasi dalam

pelaporan keuangan turut memperkuat kebutuhan akan sistem digital yang mampu menyajikan data secara real-time dan mudah diakses oleh masyarakat maupun lembaga pengawas.

Keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi pelaporan menunjukkan bahwa kedua aspek tata kelola tersebut saling melengkapi dalam menciptakan iklim pemerintahan desa yang adaptif terhadap transformasi digital. Dengan adanya digitalisasi, proses administrasi dan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta pembangunan infrastruktur teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan terdigitalisasi secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 6(2), 102–110.
- Amtiran, Y. F., & Molidya, E. (2020). *Keuangan negara dan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bahtiar, D., & Ardiansyah, D. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pelaporan terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(5), 1–18.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gwijangge, A., Kesaulija, Y., & Mirino, E. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 120–130.
- Klaudia, S. (2024). Digitalisasi pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi*, 5(1), 55–65.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik: Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Sabarno, H. (2007). *Reformasi birokrasi dan transparansi pemerintah daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sipakoly, M. R., Rahail, F., & Manday, A. (2023). Tantangan keamanan dalam sistem digital pemerintahan desa. *Jurnal Sistem Informasi dan Keamanan Data*, 11(2), 88–96.

Transparency International. (2020). Using digital technology to promote transparency in public finance. Retrieved from <https://www.transparency.org/>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

World Bank. (2021). Enhancing public sector transparency and accountability through digital tools. Washington, DC: World Bank Publications.

Yanti, E. R., Wiralestari, W., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*, 9(1), 45–58.